

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan tentang Transparansi Pengelolaan dana desa di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dengan fokus pada Transparansi Pengelolaan dana desa dan ketersediaan informasi yang memadai. Ditinjau dari tersedianya informasi yang memadai sudah cukup baik, pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah desa terhadap dinilai cukup baik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup baik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik juga, sehingga secara keseluruhan melihat transparansi penggunaan dana desa di Desa Manumutin Silole sudah berjalan dengan cukup baik.

1. Tersedianya informasi yang memadai tentang Pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik. Pemerintah Desa Manumutin Silole sudah cukup baik karena dilaksanakan secara terbuka, memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa baik secara nominal maupun rancangan pengalokasian dana dalam setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dan tokoh masyarakat melalui forum desa. Ketersediaan informasi juga dilakukan dengan papan informasi dalam bentuk reklame serta pembuatan prasasti setiap pembangunan proyek selesai.
2. Pengetahuan masyarakat tentang dana desa. Menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini dikarenakan adanya berbagai bentuk respon daya tanggap masyarakat desa Manumutin Silole dan pemerintah desa, pengetahuan masyarakat tentang dana desa dilihat adanya pemahaman masyarakat yang telah mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan dan bagaimana pengalokasiannya.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini dibuktikan melalui pemberdayaan masyarakat lokal desa dalam pembangunan desa melalui program padat karya selama masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan dana desa. Dilihat dari dimensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Manumutin Silole menunjukkan hasil yang cukup baik dimana upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan desa tahap pelaksanaannya dengan model padat

karya sehingga terjadi simbiosis hubungan saling menguntungkan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

Agar penggunaan dana desa menghasilkan dampak yang positif yang lebih baik lagi demi kemajuan desa, pemerintah desa Manumutin Silole perlu melakukan pemetaan potensi desa sehingga harus diutamakan misalkan potensi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adrianto, Niko. 2007. *Good e-Goverment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Melalui E-Goverment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Asy'ari I, Sapari. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- David, Fred R., "Manajemen Strategi Konsep", Salemba Empat, Jakarta.
- Dirgantoro, Crown. 2001. *Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi*
- Dwiyanto, A. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan. Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Hari Sabarno*. 2010. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan ketiga puluh tiga. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Rangkuti, Freedy. 2014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Skripsi dan Jurnal***
- Danni Pangaribowo, skripsi: "*Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas*". Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2018,
- Endang Juliana, skripsi: "*Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*", Universitas Sumatera Utara Medan. 2017, (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 15:58)

- Hanifah dan Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal dan Ilmu Riset Akuntansi 4(2)
- Kisnawati, dkk., 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. Jurnal Valid. Vol. 15No. 1, Januari2018:1-10
- Masihad A. 2018. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Walisongo, Semarang.
- Roberto, Silas., Lutfi, Muhtar., Nurnaningsih. 2015. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jurnal IDEAL. Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo. Palu.
- Sri Mulyaningsih, skripsi: “*Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. 2019.
- Standar Akutansi 2005. Hanni Andini, skripsi : “*Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keungan Desa*”. Skripsi Universitas Dharma Yogyakarta. 2017, hlm 30.
- Ultafiah, Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sumber Lain

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa